



POLICY BRIEF

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian

MENGUKUR DAYA SAING USAHA TANI PADI INDONESIA DENGAN NEGARA PRODUSEN UTAMA¹

PENDAHULUAN

1. Sebagai bahan pangan pokok, padi ditanam dan diusahakan secara intensif di banyak negara, utamanya di kawasan Asia. Namun demikian, biaya untuk menghasilkan per satu kilogram gabah, ternyata berbeda antar negara. Penyebab perbedaan tersebut antara lain: (a) kondisi lahan (kesuburan dan ketersediaan infrastruktur); (b) dukungan kebijakan pemerintah, khususnya subsidi input dan output; (c) ketersediaan input yang berkualitas; (d) pemutakhiran teknologi yang diadopsi petani; serta (e) teknis budidaya dan skala penguasaan lahan per petani. Terkait dengan biaya usaha tani padi, beberapa pihak berpendapat bahwa biaya usaha tani padi Indonesia dalam perkembangannya semakin kurang efisien dibanding negara lain; sehingga dikhawatirkan harga beras di pasar domestik akan semakin mahal. Untuk itu, perlu dilakukan kajian ringkas perbandingan biaya usaha tani padi antar negara produsen, agar dapat dirumuskan kebijakan yang dapat mendorong efisiensi usaha tani padi sekaligus meningkatkan pendapatan petani padi.

BIAYA USAHA TANI PADI NEGARA PRODUSEN UTAMA

2. Ada sembilan negara yang diperbandingkan biaya usaha tani padinya, yaitu Indonesia, India, Tiongkok, Vietnam, Thailand, Filipina, Pakistan, Bangladesh, dan Jepang. Pilihan negara tersebut didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data yang relatif baru (2021-2022), kondisi sumber daya lahan yang relatif sama, dan kesetimbangan harga gabah/beras, kecuali Jepang. Sumber data berasal dari lembaga resmi pemerintah masing-masing negara (Tabel 1). Hasil perbandingan menunjukkan beberapa hal penting sebagai berikut:
 - a. Selain Jepang, total biaya usaha tani padi yang tertinggi adalah Tiongkok (Rp32,26 juta/ha); sementara yang terendah adalah Pakistan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komoditas padi diusahakan secara intensif di banyak negara, di kawasan Asia. Biaya usaha per satu kilogram gabah, berbeda antar negara karena: kondisi lahan (kesuburan dan ketersediaan infrastruktur), dukungan kebijakan pemerintah, khususnya subsidi input dan output, ketersediaan input yang berkualitas, pemutakhiran teknologi yang diadopsi petani; serta teknis budidaya dan skala penguasaan lahan per petani.

Struktur ongkos padi Indonesia relatif kompetitif dengan negara produsen yang lain, dengan biaya per kg GKG sekitar Rp3.322 per kg dan R/C 1,59. Efisiensi teknis usaha tani padi Indonesia masih dapat ditingkatkan, utamanya melalui penggunaan benih unggul (termasuk hibrida) bersertifikat dan penggunaan alsintan yang lebih masif. Penggunaan pestisida yang masih tinggi perlu dikendalikan, baik melalui penggunaan varietas unggul yang lebih tahan organisme pengganggu tanaman (OPT) maupun penerapan pengendalian OPT secara terpadu. Menimbang bahwa padi/beras sebagai bahan pangan pokok dan strategis, negara produsen padi umumnya menerapkan dukungan kebijakan yang komprehensif.

Agar usahatani padi di Indonesia dapat lebih bersaing, disarankan beberapa hal sebagai berikut: (a) pengendalian alih fungsi lahan sawah, utamanya di Jawa, (b) peningkatan efisiensi usaha tani padi, utamanya melalui penggunaan benih unggul bersertifikat dan alsintan, (c) peningkatan produksi beras dapat bersumber dari peningkatan rendemen gabah ke beras yang saat ini berkisar antara 55-60 persen, (d) peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian untuk melakukan pendampingan petani secara lebih optimal, dan (e) belajar dari keberhasilan pengalaman era Program Bimbingan Massal (Bimas) dan pengendalian inflasi; diperlukan lembaga "komando" (dapat ditunjuk dari K/L yang sudah ada) yang merupakan perpanjangan tangan langsung Presiden untuk menjadi "dirijen" program peningkatan produksi pangan strategis.

¹ Bahan Dipersiapkan oleh: Adi Setiyanto, Sudi Mardianto, dan Sumedi

(Rp14,55 juta/ha). Total biaya usaha tani Indonesia (Rp17,45 juta/ha), tertinggi setelah Tiongkok dan Bangladesh (Rp19,62 juta/ha). Total biaya usaha tani padi di India, Vietnam, Thailand, dan Philipina berkisar antara Rp15,19-Rp15,91 juta per hektar. Jepang dikecualikan karena total biaya usaha tani padinya mencapai Rp148,30 juta per hektar.

- b. Total penerimaan petani padi Indonesia (Rp27,82 juta/ha), lebih rendah dibanding Tiongkok (Rp46,57 juta/ha) dan Philipina (Rp27,92 juta/ha); namun masih lebih tinggi dibanding India, Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Bangladesh yang berkisar Rp22,59 juta/ha hingga Rp24,73 juta/ha). Khusus untuk Jepang, total penerimaannya mencapai Rp183,96 juta/ha.
 - c. Total penerimaan usaha tani padi diperoleh dari perkalian produksi per hektar (produktivitas) dengan harga gabah per kg (keduanya dalam bentuk gabah kering giling atau GKG). Produktivitas padi tertinggi dicapai oleh Vietnam dan Tiongkok yang mencapai sekitar 6,8 ton per hektar; sementara produktivitas Indonesia relatif sama dengan Thailand, Pakistan, dan Jepang yang berkisar 5,2 ton per hektar; sedangkan produktivitas padi India, Philipina, dan Bangladesh sekitar 4,7 ton per hektar. Harga gabah terendah adalah Vietnam (Rp3.290 per kg) dan tertinggi adalah Tiongkok (Rp6.868 per kg). Harga gabah di Indonesia, India, Philipina, dan Bangladesh relatif sama sekitar Rp5.000an per kg; sementara Pakistan dan Thailand sekitar Rp4.000an. Khusus di Jepang harga gabah mencapai Rp35.378 per kg.
 - d. Rasio antara total biaya usaha tani padi dengan produksi per hektar akan diperoleh biaya per kg gabah. Vietnam, Thailand, dan Pakistan biaya per kg gabahnya relatif paling rendah (di bawah Rp3.000 per kg); dibanding Indonesia, India, dan Philipina yang berkisar Rp3.000an per kg; serta Tiongkok dan Bangladesh yang sekitar Rp4.000an per kg. Khusus Jepang, biaya per kg gabahnya mencapai Rp28.520 per kg.
3. Pendalaman terhadap struktur biaya usaha tani padi antar negara, dapat diperoleh beberapa informasi penting sebagai berikut:
 - a. Biaya kebutuhan benih Indonesia (Rp558 ribu/ha) terendah setelah Bangladesh (Rp416 ribu/ha); sementara Thailand, Tiongkok, dan Vietnam biayanya berkisar antara Rp1,05-1,98 juta per ha). Perbedaan biaya benih diduga berkaitan dengan volume serta jenis dan kualitas benih yang digunakan. Berdasarkan Tabel 3, volume penggunaan benih di India, Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan Philipina berkisar 62-85 kg per hektar; sementara Indonesia dan Bangladesh sekitar 49 kg per hektar. Harga per kg benih di Indonesia sekitar Rp11.000 per kg; sementara di Tiongkok dan Thailand masing-masing mencapai Rp28.210 per kg dan Rp30.415 per kg. Perbedaan volume kebutuhan benih diduga berkaitan dengan teknis penanaman, dimana di Tiongkok dan Vietnam dominan tanam benih langsung; sementara di Indonesia dominan tanam pindah dengan pola tanam tertentu (misalnya tegel dan jajar legowo). Perbedaan harga benih menunjukkan perbedaan jenis dan kualitas benih. Di Tiongkok diduga lebih banyak menggunakan benih hibrida; sementara di Indonesia masih dominan inbrida dan benih tidak bersertifikat.
 - b. Biaya tenaga kerja manusia terbesar terdapat di Bangladesh (Rp10,97 juta/ha); sementara yang relatif rendah adalah Thailand (Rp2,30 juta/ha) dan Vietnam (Rp2,94 juta/ha). Indonesia, India, dan Philipina biaya untuk tenaga kerja manusianya relatif sama sekitar Rp5 jutaan per hektar; sementara di Tiongkok sekitar Rp6,89 juta per hektar. Besaran biaya tenaga kerja utamanya ditentukan oleh upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Upah tenaga kerja di Indonesia, India, Pakistan, dan Bangladesh dalam kisaran Rp50.000-Rp85.000 per hari orang kerja (HOK); sementara di Tiongkok, Vietnam, dan Thailand dalam kisaran Rp130.000-Rp250.000 per HOK. Dengan tingkat upah yang relatif tinggi, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di Thailand, Vietnam, dan Tiongkok relatif sedikit,

yaitu masing-masing sebanyak 10,40 HOK/ha; 21,96 HOK/ha; dan 27,35 HOK/ha. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang diperlukan di Indonesia sebesar 94,9 HOK/ha, India (77,75 HOK/ha), Philipina (69,60 HOK/ha), Pakistan (59,28 HOK/ha), dan Banglades (179,15 HOK/ha). Jumlah tenaga kerja yang diperlukan sudah mencakup tenaga kerja luar dan dalam keluarga.

- c. Mahalnya upah tenaga kerja di Tiongkok mengkondisikan petani untuk menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara masif, sehingga biaya sewanya mencapai Rp7,22 juta per hektar. Kondisi yang berbeda terjadi di Vietnam, walaupun upah tenaga kerja di negara tersebut juga relatif mahal, namun biaya sewa alsintan yang dikeluarkan relatif kecil (Rp1,89 juta per ha). Hal ini diduga berkaitan dengan kepemilikan alsintan oleh petani yang berkembang pesat. Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam menyatakan mekanisasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian di Vietnam mengalami kemajuan pesat. Selama kurun waktu 2011-2021, jumlah traktor segala jenis meningkat 48 persen, mesin pemanen meningkat 79 persen, dan mesin pengering hasil pertanian meningkat 29 persen. Indonesia, India, dan Banglades masih perlu penetrasi alsintan yang lebih masif dibanding Philipina dan Pakistan.
- d. Biaya sewa lahan di Indonesia (Rp2,24 juta/ha/musim) terendah setelah Philipina (Rp1,21 juta/ha/musim). Biaya sewa lahan tertinggi adalah Tiongkok (Rp8,68 juta/ha/ musim); sementara di Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Banglades dalam kisaran Rp3 jutaan per ha per musim; dan di India sekitar Rp4,03 juta per ha per musim.
- e. Penggunaan pestisida Indonesia paling tinggi (3,96 liter/ha) dibanding delapan negara yang lain. Fakta ini perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan isu keamanan pangan dan prinsip usaha tani yang berkelanjutan (baca: ramah lingkungan).

KEBIJAKAN PENDUKUNG

4. Sebagai salah satu bahan pangan pokok, produksi padi diupayakan untuk semakin meningkat dan efisien secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara produsen utama beras umumnya memberikan dukungan kebijakan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing negara. Dengan demikian, dukungan kebijakan usaha tani padi relatif beragam antar negara, seperti diuraikan secara ringkas berikut ini:
 - a. Dukungan kebijakan usaha tani padi di **India** antara lain: (i) subsidi input produksi, seperti benih, pupuk, alat dan mesin, listrik untuk pertanian dan irigasi; (ii) dukungan harga output (gabah) dalam bentuk *Minimum Support Price* (MSP); (iii) subsidi bunga pinjaman untuk biaya usaha tani padi; dan (iv) pengadaan beras pemerintah untuk bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Pengadaan beras pemerintah India (*rice procurement*) oleh *Food Corporation of India* (FCI) pada musim tanam 2023-2024 mencapai 45,44 juta ton (turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 49,01 juta ton). Selain itu, pemerintah India juga menerapkan kebijakan yang disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis. Sebagai contoh, untuk mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina, pemerintah India pada akhir tahun 2022 menerapkan kebijakan pembatasan ekspor beras dan penetapan harga minimum ekspor beras Basmati. Selain itu, untuk mengatasi kenaikan harga pupuk, pemerintah India memberikan subsidi transportasi kepada pabrik pupuk India. Dukungan kebijakan terbaru, sejak Mei 2022 Pemerintah India memberikan bantuan kepada petani untuk membeli "drone" yang digunakan untuk memantau kondisi pertanaman, pemupukan dan penyemprotan pestisida, serta digitalisasi lahan.
 - b. Pemerintah **Tiongkok** memberikan berbagai dukungan untuk usaha tani padi, antara lain subsidi benih, pupuk, pembelian mesin pertanian, asuransi pertanian, irigasi, dan pembelian gabah petani sesuai harga pemerintah (*minimum procurement price*) maksimal 50 juta ton gabah per tahun. Harga pembelian minimum gabah diumumkan sebelum musim tanam, dan

hanya berlaku beberapa bulan setelah panen. Pemerintah Tiongkok menugaskan Sinograin dan perusahaan milik negara lainnya untuk melakukan pembelian gabah (baca: intervensi) sesuai dengan harga yang ditetapkan jika harga pasar turun di bawah batas minimum yang ditentukan. Sejak 2018, hanya gabah kelas 3 atau lebih tinggi yang dapat dibeli dengan harga minimum. Namun, dalam situasi luar biasa di mana terdapat sejumlah besar gabah di bawah kualitas 3, misalnya dalam kasus cuaca ekstrem, pemerintah provinsi juga dapat membeli gabah tersebut sebagai cadangan sementara. Pengadaan pemerintah hanya dapat dimulai ketika harga pasar telah turun di bawah harga minimum selama tiga hari berturut-turut dan harus ditangguhkan ketika harga pasar naik di atas harga minimum selama tiga hari berturut-turut. Sejak 2020, pemerintah Tiongkok membatasi volume pembelian gabah sebanyak 50 juta ton, yang terbagi atas 20 juta ton untuk jenis Indica dan 30 juta ton untuk jenis Japonica. HPP gabah 2024 ditetapkan sebesar 127 yuan per 50 kg (sekitar Rp5.643 per kg dengan kurs 1 yuan Rp2.222) untuk gabah Indica yang ditanam awal dan 129 yuan (sekitar Rp5.733 per kg) untuk yang ditanam pertengahan tahun; sementara untuk Japonica 131 yuan untuk volume yang sama (sekitar Rp5.820).

- c. Selain subsidi (benih, pupuk, irigasi, dan asuransi pertanian), pemerintah **Thailand** menggunakan instrumen yang berbeda untuk mendukung usaha tani padi, dimana lebih banyak memberikan *direct payment* untuk petani yang mengikuti program pemerintah, seperti menunda penjualan gabah/beras dan merotasi tanaman padi dengan tanaman palawija (utamanya jagung) untuk musim tanam tertentu. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi bunga pinjaman bagi petani dan pelaku usaha perberasan yang mengikuti program cadangan beras serta bagi petani dan kelompok tani yang akan membangun gudang penyimpanan gabah/beras. Terkait hal ini, Pemerintah Thailand menyediakan pinjaman dengan subsidi bunga (3% di bawah bunga komersial untuk lima tahun pertama) untuk membangun gudang penyimpanan. Petani individu dapat meminjam hingga 1.500 baht (sekitar Rp65,7 juta dengan kurs 1 baht sebesar Rp438); sementara untuk kelompok tani dapat meminjam hingga 3 juta baht (sekitar Rp1,3 milyar).
- d. Pemerintah **Vietnam** mempunyai banyak program yang memberikan subsidi pada input seperti benih, pupuk, dan air irigasi (umumnya petani membayar sekitar setengah dari biaya pemeliharaan dan pengoperasian irigasi). Selain itu, petani, produsen dan importir pupuk, serta usaha pengolahan dan pedagang beras, juga disediakan kredit berbunga rendah. Sebagai salah satu sumber devisa utama, pemerintah Vietnam juga menerapkan kebijakan pencegahan konversi lahan sawah dan pengembangan varietas beras khusus (beras wangi, fortifikasi, japonica). Selain itu, Vietnam juga berencana untuk mengurangi ekspor beras dari sekitar 7,1 juta ton (saat ini) menjadi 4 juta pada tahun 2030. Tujuan pengurangan ekspor beras tersebut untuk meningkatkan ekspor beras berkualitas tinggi, memastikan ketahanan pangan dalam negeri, melindungi lingkungan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim.
- e. Perhatian terhadap sektor pertanian, khususnya usaha tani padi, saat ini semakin besar seiring dengan kebijakan politik, dimana Presiden **Philipina** saat ini merangkap sekaligus sebagai Menteri Pertanian. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap anggaran sektor pertanian yang meningkat 40 persen, dari PHP117,29 miliar (USD 2,2 miliar) pada 2022 menjadi PHP 163,5 miliar (USD 3 miliar) pada 2023. Pemerintah Philipina hingga saat ini masih menetapkan kebijakan pencapaian swasembada beras. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Philipina memberikan dukungan kebijakan untuk usaha tani padi yang lebih banyak dibanding komoditas yang lain, seperti subsidi input, tarif impor beras, dukungan anggaran yang lebih besar untuk produsen beras, dan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras.
- f. Pemerintah **Pakistan** menempuh kebijakan memberikan subsidi input seperti listrik dan pupuk, subsidi bunga pinjaman untuk biaya usaha tani padi dan pembelian alsintan, subsidi harga gas untuk pabrik pupuk, dan penetapan harga minimum beras ekspor. Selain itu, pemerintah Pakistan juga menerapkan pajak impor beras (10%) dan pajak penjualan beras impor (15%).

- g. Produksi padi **Bangladesh** pada tahun 2023 mencapai rekor tertinggi hingga 58 juta ton (naik sekitar 700 ribu ton dibanding 2022). Capaian tersebut diklaim pemerintah Bangladesh sebagai hasil dari inovasi pertanian (penggunaan benih bermutu, termasuk hibrida dan modernisasi alsintan) dan praktik usaha tani padi yang berkelanjutan. Instrumen kebijakan lain yang digunakan adalah pembelian gabah dan beras oleh pemerintah untuk penguatan cadangan pangan. Pada 2024, pemerintah Bangladesh menetapkan pembelian gabah dan beras pemerintah masing-masing sebesar 500 ribu ton dan 1,2 juta ton. HPP untuk gabah dan beras masing ditetapkan sebesar Tk32 per kg (sekitar Rp5.536 per kg) dan Tk45 per kg (sekitar Rp7.785 per kg) (perhitungan dengan kurs 1 Taka sebesar Rp173).
- h. Pemerintah **Jepang** menempuh kebijakan memberikan pembayaran langsung (*direct payment*) dan subsidi bagi produsen (petani) dari Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang (MAFF). Pembayaran langsung merupakan program yang memberikan dukungan pendapatan kepada petani yang menjalankan usaha tani padi sebesar selisih antara biaya produksi dan harga beras "di tingkat petani", terlepas dari besarnya skala usahatani. Subsidi diberikan dalam bentuk "*cash transfer*" ke petani petani. Sebagai contoh, petani yang menanam padi untuk pakan diberi subsidi sebesar 55.000 yen (sekitar Rp5,61 juta dengan kurs Rp102 per 1 yen) per 1000 meter persegi apabila menghasilkan padi sebanyak 380 kg per 1000 meter persegi. Subsidi bagi petani yang menanam padi untuk bahan baku tepung, industri pengolahan, dan cadangan pangan; lebih besar dibanding untuk pakan. Untuk mengkondisikan stabilitas harga, pemerintah Jepang juga memberikan insentif sebesar 7.500 yen (Rp760 ribu) per 0,1 hektar bagi petani yang mengikuti pembatasan produksi padi oleh pemerintah setempat (prefektur).

KESIMPULAN

5. Berdasarkan uraian struktur ongkos padi, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:
 - a. Struktur ongkos padi Indonesia relatif kompetitif dengan negara produsen yang lain, yang diindikasikan dari nilai rasio penerimaan dengan biaya total (R/C) sekitar 1,59 (tertinggi dibanding delapan negara lain) dan biaya per kg GKG sekitar Rp3.322 per kg (relatif setara dengan India dan Philipina; namun lebih mahal dibanding Vietnam, Thailand, dan Pakistan).
 - b. Efisiensi teknis usaha tani padi Indonesia masih dapat ditingkatkan, utamanya melalui penggunaan benih unggul (termasuk hibrida) bersertifikat dan penggunaan alsintan yang lebih masif. Penggunaan benih unggul bersertifikat yang didukung penggunaan input secara optimal dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas gabah (rendemen tinggi); sementara penggunaan alsintan dapat mengurangi biaya tenaga kerja manusia.
 - c. Penggunaan pestisida yang masih tinggi perlu dikendalikan, baik melalui penggunaan varietas unggul yang lebih tahan organisme pengganggu tanaman (OPT) maupun penerapan pengendalian OPT secara terpadu. Hal ini perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan isu keamanan pangan dan prinsip usaha tani padi berkelanjutan.
6. Menimbang bahwa padi/beras sebagai bahan pangan pokok dan strategis, negara produsen padi umumnya menerapkan dukungan kebijakan yang komprehensif (subsidi input; subsidi bunga pinjaman untuk usaha tani padi, pembelian alsintan, dan usaha penggilingan padi; pembelian pemerintah untuk penguatan cadangan pangan; dan pajak ekspor-impor beras). Indonesia saat ini praktis hanya didukung oleh instrumen subsidi pupuk dan pembelian gabah/beras pemerintah melalui penugasan ke Bulog.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

7. Tantangan usaha tani padi Indonesia semakin kompleks dan agar dapat lebih bersaing dibanding negara produsen yang lain, disarankan beberapa kebijakan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian alih fungsi lahan sawah, utamanya di Jawa, yang hingga saat ini masih menjadi tumpuan utama produksi padi nasional. Upaya pengendalian harus dibarengi dengan perbaikan dan penyediaan infrastruktur irigasi yang memadai.
 - b. Peningkatan efisiensi usaha tani padi, utamanya melalui penggunaan benih unggul bersertifikat dan alsintan. Penyediaan benih unggul bersertifikat saat ini menjadi persoalan seiring dengan berubahnya sistem kelembagaan perbenihan padi nasional. Untuk itu, perlu segera dilakukan pembenahan kelembagaan perbenihan nasional, utamanya lembaga penyedia benih sumber.
 - c. Untuk daerah atau wilayah yang tingkat produktivitasnya sudah di atas rata-rata nasional, salah satu upaya peningkatan produksi beras dapat bersumber dari peningkatan rendemen gabah ke beras yang saat ini berkisar antara 55-60 persen. Dengan proses produksi padi yang optimal (benih unggul bersertifikat, input optimal, serta penanganan panen dan pascapanen optimal) dan RMU modern dapat dihasilkan rendemen gabah ke beras 70 persen.
 - d. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian untuk melakukan pendampingan petani secara lebih optimal. Disinyalir, salah satu penyebab penggunaan pestisida yang relatif tinggi karena petani saat ini lebih banyak berkonsultasi dengan kios pertanian dibanding ke PPL.
 - e. Terkait dengan tantangan peningkatan produksi padi secara berkelanjutan yang tidak ringan, pemerintah perlu meningkatkan keseriusan untuk mengurangi konsumsi beras per kapita, melalui diversifikasi sumber karbohidrat selain beras.
 - f. Saat ini berbagai tantangan usaha tani padi dan usaha pertanian lainnya, sebagian besar berkaitan dengan kementerian/lembaga di luar Kementan. Contoh, tata kelola air utamanya dikelola oleh Kementerian PUPR; pengendalian alih fungsi lahan dalam kendali pemerintah daerah dan kementerian ATR/BPN; penyediaan pupuk dalam kendali Kementerian BUMN; pengaturan harga dan cadangan beras pemerintah oleh Badan Pangan Nasional; dan kepatuhan pelaksanaan kegiatan di daerah perlu dukungan Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, belajar dari keberhasilan pengalaman era Program Bimbingan Massal (Bimas) dan pengendalian inflasi; diperlukan lembaga "komando" (dapat ditunjuk dari K/L yang sudah ada) yang merupakan perpanjangan tangan langsung Presiden untuk menjadi "dirijen" program peningkatan produksi pangan strategis.

Tabel 1. Hasil Analisis Usahatani Padi Indonesia dan Beberapa Negara Asia per Hektar per musim Tahun 2021-2022 (Rp000)

No	Keterangan	Indonesia ¹	India ²	Tiongkok ³	Vietnam ⁴	Thailand ⁵	Philippines ⁶	Pakistan ⁷	Bangladesh ⁸	Jepang ⁹
A.	Biaya Variabel									
1	Benih	558,05	618,82	1.749,08	1.050,21	1.976,58	964,85	737,44	415,52	11.277,63
2	Pupuk	2.048,46	1.340,18	4.350,63	3.115,14	2.759,94	3.229,28	2.395,16	2.410,85	27.178,30
3	Pestisida	1.441,44	453,87	3.029,86	2.010,13	1.590,55	723,88	244,01	540,18	11.798,53
4	Tenaga Kerja Manusia	5.511,48	5.377,26	6.891,31	2.944,16	2.297,72	5.911,62	3.121,10	10.969,75	7.228,88
5	Sewa Alsintan	2.128,91	2.251,51	7.216,81	1.892,52	2.938,22	2.057,30	3.602,93	1.371,22	36.189,98
6	Biaya Variabel Lainnya	1.334,77	1.146,04	183,29	334,02	593,21	727,61	238,19	706,39	27.425,73
	Sub Total	13.023,11	11.187,67	23.420,98	11.346,17	12.156,22	13.614,53	10.338,82	16.413,90	121.099,05
B.	Biaya Tetap									
1	Sewa Lahan	2.240,99	4.025,53	8.677,23	3.433,28	3.343,06	1.214,37	3.578,75	2.908,65	17.124,80
2	Pajak, Iuran dan Lainnya	764,23	110,65			4,51	371,81	14,31		3.138,46
3	Biaya Tetap Lainnya	1.417,39	581,21	58,23	411,71	117,33	581,82	614,89	295,61	6.941,08
	Sub Total	4.422,61	4.717,39	8.735,46	3.844,99	3.464,90	2.168,00	4.207,95	3.204,25	27.204,34
	Total Biaya	17.445,72	15.905,07	32.156,44	15.191,16	15.621,12	15.782,52	14.546,78	19.618,16	148.303,39
C.	Penerimaan									
1	Produksi (Kg)	5.251,50	4.768,13	6.780,29	6.863,33	5.236,82	4.760,01	5.189,21	4.720,79	5.200,00
2	Harga (Rp/Kg)	5.297,25	5.076,36	6.867,84	3.290,84	4.721,64	5.866,28	4.219,72	5.130,14	35.378,23
	Total Penerimaan	27.818,51	24.204,72	46.565,95	22.586,13	24.726,38	27.923,52	21.897,04	24.218,31	183.966,82
D.	Pendapatan	10.372,79	8.299,66	14.409,50	7.394,97	9.105,26	12.141,00	7.350,26	4.600,16	35.663,43
E.	R/C Ratio	1,59	1,52	1,45	1,49	1,58	1,77	1,51	1,23	1,24
F.	Biaya Per Kg (Rp/Kg)	3.322,04	3.335,70	4.742,64	2.213,38	2.982,94	3.315,65	2.803,27	4.155,69	28.519,88

Keterangan: Sumber Data (Diolah) 1= Data Patanas PSEKP (2022-2023); 2= Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Economics & Statistics Division (2023); 3 = China Agricultural Statistics (2023) dan Philippine Rice Research Institute (Philrice, 2023); 4=Vietnam General Statistics Office (2023), Philrice (2023) dan Philippines Rice Industry Roadmap 2030 (2022); 5 = Thailand Departement of Socio Economics Statistics (2023), Philrice (2023) dan Philippines Rice Industry Roadmap 2030 (2022); 6= 2022 Survey on Costs and Returns of Paddy Production Philippine Statistics Authority (2023), 7 = Pakistan Rice Paddy Policy Analysis For 2022-23 Crop, API Series No 248 (2023), 8 = Bangladesh Bureau of Statistics (2023) dan Bangladesh Rice Research Institute (2023); 9= Statistical Survey on Farm Management Production Cost of Crops (Individual Management Entities) by the Statistics Department of MAFF (2023);

Nilai Tukar 2021-2022: US\$ 1 = 6.45 Chinese Yuan, 49.29 Philippino Peso, 73.94 Indian Rupees, 30.05 Thailand Bath, 109.87 Japanese Yen, 163.01 Pakistani Rupees, 85.09 Bangladesian Taka, 22,938.00 Vietnamese Dong, dan 14,308.00 Indonesian Rupiah

Tabel 2. Hasil Analisis Struktur Usahatani Padi Indonesia dan Beberapa Negara Asia Per Hektar Tahun 2021-2022 (dalam Persen)

No	Keterangan	Indonesia	India	Tiongkok	Vietnam	Thailand	Philippines	Pakistan	Bangladesh	Jepang
A.	Biaya Variabel									
1	Benih	3,20	3,89	5,44	6,91	12,65	6,11	5,07	2,12	7,60
2	Pupuk	11,74	8,43	13,53	20,51	17,67	20,46	16,47	12,29	18,33
3	Pestisida	8,26	2,85	9,42	13,23	10,18	4,59	1,68	2,75	7,96
4	Tenaga Kerja Manusia	31,59	33,81	21,43	19,38	14,71	37,46	21,46	55,92	4,87
5	Sewa Alsintan	12,20	14,16	22,44	12,46	18,81	13,04	24,77	6,99	24,40
6	Biaya Variabel Lainnya	7,65	7,21	0,57	2,20	3,80	4,61	1,64	3,60	18,49
	Sub Total	74,65	70,34	72,83	74,69	77,82	86,26	71,07	83,67	81,66
B.	Biaya Tetap									
1	Sewa Lahan	12,85	25,31	26,98	22,60	21,40	7,69	24,60	14,83	11,55
2	Pajak, Iuran dan Lainnya	4,38	0,70			0,03	2,36	0,10		2,12
3	Biaya Tetap Lainnya	8,12	3,65	0,18	2,71	0,75	3,69	4,23	1,51	4,68
	Sub Total	25,35	29,66	27,17	25,31	22,18	13,74	28,93	16,33	18,34
C.	Total Biaya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Tabel 1 (diolah)

Tabel 3. Rata-rata Penggunaan Input Usahatani Padi Indonesia dan Beberapa Negara Asia Per Hektar Tahun 2021-2022

Keterangan	Indonesia ¹	India ²	Tiongkok ³	Vietnam ⁴	Thailand ⁵	Philippines ⁶	Pakistan ⁷	Bangladesh ⁸
Benih (Kg/Ha)	49,24	78,13	62,00	85,20	65,50	75,41	42,45	49,42
Pupuk Kimia (Kg/Ha)	214,50	163,50	304,50	155,00	115,00	151,00	174,95	231,23
Pestisida (Kg atau Ltr / Ha)	3,96	1,02	2,49	2,72	1,36	1,02	1,52	1,92
Tenaga Kerja Luar Keluarga (HOK/Ha)	76,63	65,67	4,47	7,96	5,24	59,22	44,15	123,55
Tenaga Kerja Dalam Keluarga (HOK/Ha)	18,27	12,18	22,88	14,00	5,16	10,38	15,13	55,60

Keterangan: Sumber Data (Diolah) 1= Data Patanas PSEKP (2022-2023), 2= Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Economics & Statistics Division (2023); 3 = China Agricultural Statistics (2023) dan Philippine Rice Research Institute (Philrice, 2023); 4=Vietnam General Statistics Office (2023), Philrice (2023) dan Philippines Rice Industry Roadmap 2030 (2022); 5 = Thailand Departement of Socio Economics Statistics (2023), Philrice (2023) dan Philippines Rice Industry Roadmap 2030 (2022); 6= 2022 Survey on Costs and Returns of Palay Production Philippine Statistics Authority (2023), 7 = Pakistan Rice Paddy Policy Analysis For 2022-23 Crop, API Series No 248 (2023), 8 = Bangladesh Bureau of Statistics (2023) dan Bangladesh Rice Research Institute (2023);